

ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA RUMPUT LAUT *EUCHEMA COTTONII* DI KABUPATEN BANTAENG (Studi Kasus di Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa'jukukang)

Asni Anwar

Universitas muhammadiyah makassar
e-mail: asnianwar@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis kebijakan dan strategi pengembangan usaha rumput laut *E.cottonii* yang berlaku saat ini, menganalisis dampak kebijakan dan strategi pengembangan usaha terhadap masyarakat khususnya petani rumput laut, menganalisis kinerja pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengembangan usaha rumput laut, dan menganalisis alternative strategi kebijakan pengembangan usaha yang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani rumput laut. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan metode kluster (Singarimbun dan Effendy 2004) sebanyak 50 responden yang mewakili kelompok pembudidaya rumput laut, enam responden mewakili tokoh masyarakat, lima pedagang rumput laut dan lima responden dari pihak pemerintah terkait, tehnik pengumpulan data dengan tehnik observasi, wawancara dan FGD (*focus group discussion*). Data dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif, analisis indikator keberhasilan kebijakan dan strategi, analisis kriteria dan indikator kinerja menurut Nikijuluw dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan pengembangan usaha rumput laut yang mengacu pada rencana pengembangan budidaya rumput laut dengan program bantuan usaha rumput laut di kabupaten Bantaeng masih kurang nyata, ditandai dengan kegagalan Koperasi Citra Mandiri yang difasilitasi oleh pemerintah. Dengan penilaian ketujuh indikator (pendapatan, pendidikan, motivasi, kesadaran masyarakat, kreativitas dan kenemandirian, pengakuan hak serta program kemitraan) yang berdampak kurang nyata. Alternatif strategi pengembangan usaha yang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani rumput laut berupa pengembangan strategi kebijakan antara pemerintah, petani rumput laut dan pedagang dengan melibatkan Perguruan Tinggi sebagai fasilitator tenaga ahli.

Kata Kunci : *strategi, usaha, rumput laut*

Abstract

The study aims to analyze policies and business development strategies seaweed E.cottonii current, analyze the impact of policies and strategies for business development against people, especially farmers seaweed, analyzing the performance of government and community leaders in the development of seaweed, and analyze alternative policy strategy development effective efforts to improve the income of farmers seaweed. Determination of the number of samples by using cluster (Singarimbun and Effendy 2004) of 50 respondents representing the farmers seaweed, six respondents representing public figures, five merchant seaweed and five respondents from the relevant government authorities, the techniques of data collection techniques of observation, interviews and FGD (focus group discussion). Data were analyzed with descriptive analysis techniques, analysis of indicators of the success of policies and strategies, analysis of criteria and indicators of performance by Nikijuluw and SWOT analysis. The results showed that the strategy of business development policies seaweed which refers to the development plan of seaweed cultivation with seaweed business assistance programs in the district are still lacking real Bantaeng, marked by the failure of Koperasi Citra Mandiri facilitated by the government. With seven votes indicators (income, education, motivation, awareness, creativity and kenemandirian, recognition of the right as well as the partnership program) which affects less real. Alternative business development strategies are effective to increase the income of seaweed farmers in the form of development strategy between government policy, seaweed farmers and traders with the involvement of Higher Education as a facilitator experts.

Keywords: *strategy, business, seaweed*

1. PENDAHULUAN

Rumput laut merupakan komoditas penting perikanan yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dan manfaatnya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, selain sebagai bahan

makanan, juga merupakan bahan baku dalam industri pembuatan obat-obatan dan kosmetik sehingga kebutuhan pemanfaatan rumput laut semakin meningkat baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk permintaan ekspor. Berdasarkan visi Menteri DKP 2010 dalam

program peningkatan produksi perikanan, menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk perikanan terbesar dunia di tahun 2015 dan rumput laut menjadi komoditas unggulan dalam program ini disamping komoditas lainnya (Nurdjana, 2010).

Bantaeng merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah diproyeksikan sebagai sentra pengolahan komoditi rumput laut melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor: KEP.08/DJ-P2HP/ 2009 (DKP, 2009). Ditetapkannya Kabupaten Bantaeng sebagai sentra pengolahan rumput laut didukung oleh potensi lahan budidaya dan masyarakat pesisir dalam membudidayakan rumput laut sebagai mata pencaharian utama. Berdasarkan data Tahun 2009, diketahui ada 3 Kecamatan penghasil rumput laut di kabupaten Bantaeng yaitu Kecamatan Bisappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Pa'jukukang. Produksi rumput laut di Kabupaten Bantaeng dalam tiga tahun terakhir terus meningkat dimana pada tahun 2006 sebesar 2334,50 ton; tahun 2007 sebesar 5700,25 hingga tahun 2009 men-capai produksi sebesar 7.677, 70 ton (DKP Provinsi Sulawesi Selatan, 2009).

Fenomena yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana kebijakan pemerintah (DKP Bantaeng) terhadap pengembangan usaha rumput laut di Kabupaten Bantaeng serta peran

pemerintah dan tokoh masyarakat terhadap usaha rumput laut sehingga akan mempengaruhi strategi pengembangan usaha yang ada dalam meningkatkan pendapatan petani rumput laut. Olehnya peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian melalui *Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan Usaha Rumput Laut Eucheuma cottonii di Kabupaten Bantaeng* untuk tujuan peningkatan usaha rumput laut.

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis kebijakan dan strategi pengembangan usaha rumput laut *E cottonii* yang berlaku saat ini; (2) Menganalisis dampak kebijakan dan strategi yang ada terhadap masyarakat khususnya petani rumput laut; (3) Menganalisis kinerja pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengembangan usaha rumput laut; dan (4) Menganalisis alternatif strategi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani rumput laut.

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di tiga Kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng (Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Pa'jukukang), Provinsi Sulawesi Selatan, dimulai pada tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 15 Mei 2012.

Tabel 1. Analisis Keberhasilan Kebijakan dan strategi Pengembangan Usaha Digunakan Analisis Indikator keberhasilan

Kriteria	Indikator	Cara Mengukur	
Tingkat pendapatan	Peningkatan relatif pendapatan masyarakat lokal	Secara kuantitatif membandingkan sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan pengembangan usaha rumput laut	dan pelaksanaan pengembangan usaha dan semakin meningkatnya peranan masyarakat dalam proses-proses pengelolaan sumberdaya alam
Pendidikan formal	Peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan formal	Perbandingan jumlah relatif lulusan masyarakat lokal dari pendidikan formal sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan pengembangan usaha.	Meningkatnya bentuk dan variasi pemanfaatan sumber-daya alam yang lestari oleh masyarakat Jumlah dan variasi pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan masyarakat
Kesadaran masyarakat	Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumberdaya alam	Semakin berkurangnya kegiatan yang bersifat merusak dan sebaliknya semakin banyaknya kegiatan yang menunjang kelestarian sumberdaya alam.	Diakuinya hukum tradisional atau masyarakat lokal dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam Jumlah dan intensitas pelaksanaan aturan lokal dan tradisional
Motivasi	Meningkatnya motivasi masyarakat dalam tahapan dan proses pengelolaan	Semakin banyak usulan dan keinginan masyarakat yang disampaikan dengan penyusunan perencanaan	Terbentuknya program kemitraan dalam pemanfaatan sumberdaya alam Efisiensi dan intensitas program kemitraan dalam menunjang kegiatan masyarakat lokal

Sumber: Dahuri *et al.*, 1998.

Data penelitian yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul, diolah dan kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan analisis secara deskriptif dan analisis indikator keberhasilan (Tabel 1).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengembangan Usaha Rumput Laut Saat Ini

Untuk memudahkan penyaluran bantuan usaha dari pihak pemerintah khususnya pihak DKP Bantaeng diperlukan adanya kelompok pembudidaya rumput laut *E cottonii* yang diharapkan akan menjadi kelompok petani rumput laut yang mandiri tanpa bantuan dana usaha dari pemerintah. Kebijakan pengembangan usaha ini pada hakekatnya merupakan hubungan antara pemerintah (DKP Bantaeng) sebagai pembuat program, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai perpanjangan tangan dari pihak pemerintah dan kelompok pembudidaya sebagai objek yang akan diberikan bantuan dana.

Dampak Kebijakan Pengembangan Usaha

Tingkat pendapatan petani rumput laut, sebelum dan setelah adanya bantuan usaha dari pemerintah, menunjukkan tingkat perubahan pendapatan sebesar 77,94 %, sehingga tingkat perubahan berada di nilai 5(lima). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada petani rumput laut setelah adanya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha rumput laut. Sebelum adanya bantuan usaha, pendapatan petani rumput laut masih sangat minim, jika pendapatan petani per-panen Rp 502.200 dan jumlah panen saat itu hanya empat kali dalam setahun, sehingga pendapatan petani pertahun sebesar Rp 2.008.800. Setelah adanya program kebijakan pemerintah, pada tahun 2010 pendapatan petani rumput laut semakin meningkat yaitu sebesar Rp 3.180.993/panen dan jumlah panen semakin meningkat yaitu sebanyak tujuh kali dalam setahun yaitu sebesar Rp 22.266.95. Dampak kualitatif dari program pemerintah melalui bantuan dana ekonomi produktif, salah satu diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yaitu ditandai dengan peningkatan pendapatan (Subri,2007). Selanjutnya menurut Dahuri (2004) bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan prinsip keberlanjutan sumberdaya.

Analisis Peran Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

Fakta empirik di lapangan, menunjukkan peran pemerintah dalam peningkatan ke-makmuran rakyat, hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya, Rahmawati (2009) bahwa di Kabupaten Bantaeng, terjadi peningkatan pendapatan petani rumput laut peserta program revitalisasi Perikanan dari pemerintah sebesar Rp.55.433.219 sedangkan petani rumput laut yang tidak mengikuti program hanya sebesar Rp.10.651.783 pertahun.

Analisis alternatif kebijakan dan strategi pengembangan usaha yang efektif untuk peningkatan pendapatan petani rumput laut.

1. Kekuatan

- Mayorit kelompok usaha mempunyai status kepemilikan lahan milik sendiri, dalam hal ini merupakan kekuatan bagi petani rumput laut untuk meningkatkan produksinya serta menjadi faktor pendukung dalam kepercayaan dalam bekerjasama dengan pihak yang terkait dengan rumput laut.
- Minat petani untuk budidaya rumput laut sangat tinggi, dan kesadaran untuk berusaha secara berkelompok sangat tinggi, hal ini akan memudahkan untuk bermitra dengan pengusaha atau investor.
- Adanya kerjasama yang baik antara kelompok petani rumput laut dengan pihak pemerintah, dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah.
- Ketua kelompok pembudidaya sudah berpengalaman dengan rata rata 7-10 tahun, serta mempunyai latar belakang pendidikan formal yang tinggi sebab sudah ada yang berlatar belakang pendidikan tingkat Sarjana, hal ini akan mempermudah bagi petani untuk penyerapan teknologi dan mempermudah kerjasama dengan pihak mitra.
- Harga rumput laut relatif tinggi, yaitu Rp 9000(sembilan ribu rupiah) perkilogram kering di tingkat petani jika dibandingkan dengan harga rumput laut *Gracillaria sp* yang harganya masih sekitarRp 2000 (Dua ribu rupiah) perkilogram.
- Minat petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng untuk bermitra dengan pemerintah cukup tinggi, yang ditandai dengan tingginya partisipasi petani rumput laut untuk pengusulan perbaikan pola kemitraan selanjutnya.

2. Kelemahan

- a. Masih minimnya kesadaran petani rumput laut untuk mengembalikan pinjaman usaha dari pemerintah sebab mereka beranggapan bantuan dari pemerintah adalah bantuan cuma-cuma yang tidak harus di bayar.
- b. Kurangnya modal usaha di pihak petani rumput laut, sehingga masih memungkinkan petani rumput laut untuk meminjam ke pedagang pengumpul, walaupun pembayarannya akan berimbas ke pemotongan harga atau pembelian harga dibawah standar harga.
- c. Kualitas rumput laut masih sering dipermainkan oleh pedagang pengumpul yang nakal, misalnya pencampuran bahan-bahan yang memberatkan timbang-an rumput laut.
- d. Kurangnya bibit yang berkualitas untuk usaha budidaya, sehingga petani rumput laut terkadang kesulitan memperoleh bibit yang baik.
- e. MOU yang telah disepakati antara pihak petani rumput laut dengan pedagang (UD Lautan Mas) dan Koperasi Citra Mandiri yang difasilitasi oleh pemerintah belum berjalan optimal sebagaimana mestinya.

3. Peluang

- a. Adanya kebijakan pemerintah yang mengandalkan rumput laut sebagai komoditi andalan dan dijadikan Kabupaten Bantaeng sebagai sentra pengolahan rumput laut yang akan membuka peluang lapangan pekerjaan, serta adanya kelompok pembudidaya yang telah di fasilitasi oleh pemerintah, hal ini akan mempermudah petani untuk melakukan mitra dengan pihak mitranya.
- b. Komitmen pemerintah melalui DKP dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor perikanan khususnya komoditi rumput laut menjadi peluang yang sangat besar bagi Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan produksinya
- c. Banyaknya bantuan dana, sarana dan prasarana dari pemerintah membuat pengelolaan rumput laut semakin berkembang, sehingga menjadikan peluang perbaikan pola kemitraan di Kabupaten Bantaeng.
- d. Sarana transportasi baik dan lancar, dengan adanya posisi daerah pesisir yang terletak pada jalur transportasi umum akan mempermudah akses pihak yang menjadi mitra petani rumput laut.

- e. Bantaeng merupakan salah satu sentra pengolahan rumput laut yang akan memudahkan pihak mitra untuk berinvestasi di Kabupaten Bantaeng.
- f. Adanya kerjasama yang intensif antara PEMDA khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng dengan pihak Perguruan Tinggi, misalnya dengan FIKP UNHAS untuk pengembangan rumput laut *E cottonii* yang membutuhkan tenaga ahli dibidang kultur jaringan, pengolahan hasil dan pemasaran. Sehingga secara bertahap menumbuhkan kemandirian di pihak petani rumput laut sebagai mitra binaan dari pemerintah.

4. Ancaman

- a. Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak berfungsi dalam kontrol kemitraan petani rumput laut yang telah terjalin mulai pada tahun 2006, sehingga terjadi kegagalan Koperasi Citra Mandiri yang pembentukannya difasilitasi oleh pihak pemerintah.
- b. Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak menjamin/menfasilitasi pemasaran rumput laut, sehingga rumput laut masih di kelola oleh pedagang pengumpul yang terkadang masih mempermainkan harga rumput di tingkat petani.
- c. Adanya permainan harga pedagang pengumpul di Kabupaten Bantaeng, yang selama ini belum dapat di optimalkan solusinya. Pedagang pengumpul mempermainkan harga beli rumput laut, mereka jeli melihat petani yang kekurangan modal usaha atau pada saat musim-musim gagal panen, mereka menawarkan pinjaman kepetani dengan syarat hasil panen petani harus dijual kepada mereka walaupun nantinya akan dibeli dengan harga rendah, misalnya harga rumput laut sekarang Rp 10.000 per Kg, tapi karena petani mempunyai utang di pedagang tersebut akhirnya harga yang dibayarkan hanya Rp 8.500 dan ada yang sampai pengurangannya sampai Rp 2500, jadi harganya cuma Rp 7500. Hal ini menjadi sebuah ancaman dalam pengelolaan sumberdaya rumput laut yang menjadi komoditi andalan Kabupaten Bantaeng.
- d. Peran stakeholder belum berpusat pada satu sistem untuk melakukan kerjasama untuk peningkatan produksi rumput laut sebagai komoditi andalan Kabupaten Bantaeng. Salah satu contoh adanya pedagang pengumpul yang

mempermainkan timbangan yang belum di kontrol secara aktif oleh pihak Perindag

5. Strategi SO

Dengan menitik beratkan antara kekuatan dan peluang yang ada dalam pengembangan usaha rumput laut untuk mengoptimalkan hubungan yang harmonis antara petani rumput laut, pedagang pengumpul dan pihak pemerintah diperlukan saling kepercayaan dan penumbuhan sikap saling ketergantungan. Langkah strategis yang memungkinkan untuk di aplikasikan dalam pengembangan usaha rumput laut di Kabupaten Bantaeng yaitu dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, baik di pihak petani rumput laut, pedagang dan pemerintah dengan melibatkan Perguruan Tinggi sebagai fasilitator tenaga ahli.

6. Strategi ST

Memanfaatkan kekuatan internal dan meminimalkan ancaman eksternal dengan strategi peningkatan kualitas kerjasama antara petani rumput laut dengan pihak pemerintah membutuhkan langkah strategis yang sangat berhati-hati. Dengan memposisikan pemerintah sebagai pengontrol harga rumput laut di Kabupaten Bantaeng akan menurunkan permainan harga yang selama ini di praktekkan oleh pedagang pengumpul.

Strategi lain yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha rumput laut adalah pemusatan peran stakeholder agar berpusat pada satu sistem pengelolaan untuk melakukan kerjasama, sehingga praktek kemitraan dapat berjalan lebih optimal.

7. Strategi WO

Memafaatkan peluang yang ada dan meminimalisir faktor kelemahan dalam pengelolaan rumput laut dilokasi penelitian adalah mengembangkan sistem permodalan baik dikalangan petani rumput laut maupun kepada pedagang rumput laut melalui koperasi, agar kestabilan harga dan peningkatan produksi dapat menjadi sejalan dengan harapan pemerintah untuk memakmurkan kehidupan petani rumput laut dan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah melalui komoditi rumput laut.

8. Strategi WT

Meminimalisir kelemahan yang ada dan mengantisipasi ancaman yang akan datang, adalah agar diberdayakannya kembali koperasi petani rumput laut sebagai wadah untuk mendapatkan modal usaha, yang dapat meningkatkan produksi rumput laut dan peningkatan taraf hidup petani rumput laut sebagai harapan untuk keberlanjutan usaha budidaya rumput laut, sebagai pekerjaan yang menjanjikan.

Dengan strategi diatas menjadi kekuatan yang menjadikan petani rumput laut mandiri sehingga mempermudah mendapat-kan inovasi baru mengenai perkembangan usaha rumput laut. Hal ini akan memberikan dampak positif dalam menyusun kebijakan dan strategi untuk peningkatan usaha rumput laut di Kabupaten Bantaeng.

Penentuan strategi yang sesuai untuk Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan usaha rumput laut kedepan didasarkan pada analisa SWOT diatas. diperoleh koordinat (0,82 : 0,95) yang mana koordinat ini masuk pada kuadran I, yakni mendukung strategi pengembangan usaha yang agresif pada pemanfaatan peluang yang ada.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan seperti telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Strategi kebijakan pengembangan usaha rumput laut yang mengacu pada rencana pengembangan budidaya rumput dengan pogram bantuan usaha rumput laut di Kabupaten Bantaeng masih kurang optimal di tandai dengan kegagalan Koperasi Citra Mandiri dan UD Lautan Mas yang difasilitasi oleh pemerintah.
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan usaha rumput laut yang dimulai pada tahun 2006 yaitu terjadinya tingkat perubahan ke tujuh indikator (pendapatan, pendidikan, motivasi, kesadaran masyarakat, kreativitas dan kemandirian, pengakuan hak serta program kemitraan) memberikan dampak kurang nyata.
3. Peran pemerintah dan tokoh masyarakat menunjukkan peran yang kurang nyata dalam pengembangan usaha petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng.
4. Alternatif strategi pengembangan usaha yang efektif untuk meningkatkan penerima-an

petani rumput laut yaitu: (1) Pengembangan kerjasama antara pemerintah, petani rumput laut dan pedagang dengan melibatkan Perguruan Tinggi sebagai fasilitator tenaga ahli. (2) pemusatan peran stakeholder dalam pengelolaan rumput laut. (3) Mengembangkan sistem per-modal dan usaha manajemen yang baik melalui koperasi dan mengadakan pe-latihan dan pembinaan bagi petani rumput laut akan pentingnya bermitra usaha serta pembentukan kebun bibit. (4) Pembentukan asosiasi dan peran koperasi diber-dayakan lagi

Berdasarkan uraian hasil kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan saran sebagai berikut :

1. Optimalisasi perbaikan kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat, petani rumput laut dan pedagang.
2. Pemerintah perlu menempatkan tenaga penyuluh yang mempunyai kemampuan dalam hal melakukan pembimbingan terhadap petani rumput laut agar dapat menumbuhkan kesadaran semua pihak yang bermitra untuk bekerjasama dan membangun hubungan yang mutualistik.
3. Perlunya pengembangan modal usaha, baik di kalangan petani rumput laut, maupun dipihak pedagang rumput laut, melalui koperasi petani rumput laut.
4. Pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu membuat regulasi yang dapat meningkatkan minat investor sebagai pihak mitra untuk menanamkan modal usahanya di Kabupaten Bantaeng.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agusanty, H, 2009. Kemitraan Usaha Dan Jaringan Sosial Pembudidaya Rumput Laut Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang). Disertasi Tidak Dipublikasikan, Makassar : PPS – UNHAS
- Aji, F.B dan Sirait, 1990. Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan. Radar Jaya Offset, Jakarta.
- Anwar A, 2009. Peranan Perempuan Dalam Usaha Budidaya Rumput Laut (*Euचेuma Cottonii*) di Kabupaten Bantaeng. Tesis Manajemen Ilmu Kelautan, Program pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Anggadiredja, J. T., A. Zalnika, H. Purwoto dan S. Istini. 2006. Rumput Laut. Penebar Swadaya. Jakarta. Hal 6-39.
- Bambang Murdiyanto. 2003. Mengenal, Memelihara dan Melestarikan Ekosistem Terumbu karang. Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.
- David R.F., 2006. Manajemen Strategis Konsep. Pustaka Setia. Bandung.
- Dahuri, R., 2001. Potensi dan permasalahan pembangunan kawasan pesisir Indonesia. PK-SPL. IPB.
- Danim, S., 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia. Bandung.
- Dirjen P2HP DKP, 2009. KEP.08/DJ-P2HP/2009, penetapan Kabupaten Bantaeng sebagai lokasi pengembangan sentra pengolahan rumput laut. Jakarta.
- Debus, 1994. Buku Petunjuk pengembangan Keterampilan Memandu Diskusi Kelompok Terarah. Washington, DC.
- Kotler, P. (1999) Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol. Edisi 11, Jilid 1, Diterjemahkan oleh Hendra Teguh dan Rusli, Prenhalindo, Jakarta.
- Layn, 2004. Dinamika Iktor *Patron-Klien* Pada Komunitas Nelaya: Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Nikijulw V.P., 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pustaka Cidesindo. Jakarta..
- Nurmianto, dkk. 2004. Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT. Jurnal Teknik Industri Vol 6 No I. Program Pascasarjana, Program Studi Manajemen Industri, ITS. Surabaya.
- Nurdjana, ML., 2010. Membangkitkan Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim, Seminar nasional FIKP Universitas Hasanuddin. Makasar
- Mallawa, A, dkk. 2005. Analisa Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di kabupaten Takalar, Kerjasama Bappeda Dengan Pusat kajian Sumberdaya dan Wilayah Pesisir (PK-SWIP) Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS.
- Made, S. dkk., 2005. Analisis keuntungan Usaha Budidaya Rumput laut (*Euचेuma Cottonii*)

Melalui Pola Kemitraan Dengan Koperasi di Kabupaten Pinrang. Jurnal Ponggawa, Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Vol 2, No 2. Universitas Hasanuddin. Makassar..

Numbery, F, 2008. Makalah. The 1st Indonesia Seewed Forum, Makassar.

Rahmawati, 2009. Pengaruh program Revitalisasi Perikanan Terhadap Pendapatan Usaha Budidaya Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*) di Kabupaten Bantaeng. Skripsi. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, FIKP. Universitas Hasanuddin. Makassar.